## PEMERINTAH DAERAH - KEUANGAN

2015

PERPUB. KUTAI KARTANEGARA NO. 1, BD 2015/NO. 1, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

## ABSTRAK

- Mengingat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan, namun perlu diatur batas jumlah pembayaran uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 15 Tahun 2014; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 41 Tahun 2014.
- Dalam Perbup ini diatur mengenai uang persedian untuk mengisi kas perangkat daerah yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persedian kepada masing-masing bendahara pengeluaran pembantu yang ada pada perangkat daerah yang sama. Ganti uang persedian adalah penggantian atau pengisian kembali uang persedian yang telah dikeluarkan yang diajukan kepada bendahara umum daerah. Tambahan uang persedian dapat diajukan dalam hal uang persedian tidak mencukupi sedangkan perangkat daerah membutuhkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mendesak.

CATATAN

- : Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2015.
  - Penjelasan: 4 Hlm.